

# Kaji Ulang Kebijakan Mengeksekusi Terpidana Mati

Oleh Tim Peradin

Rabu, 17 Desember 2014 12:33 - Terakhir Diupdate Rabu, 17 Desember 2014 12:36

---

Sastra Pembinaan Selasa, 16 Desember 2014 Opini & Editorial **231**

## Kaji Ulang Kebijakan Mengeksekusi Terpidana Mati

**B**erapa kali, pemerintah telah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan mengeksekusi terpidana mati. Namun, sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan. Kebijakan ini dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan yang adil. Namun, banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa hukuman mati justru melanggar hak asasi manusia. Mereka juga khawatir bahwa hukuman mati dapat digunakan sebagai alat politik yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang menginginkan keadilan bagi korban kejahatan berat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian ulang yang komprehensif terhadap kebijakan ini. Hal ini harus mencakup aspek hukum, sosial, dan politik.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sistem peradilan yang independen dan transparan. Hal ini akan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tanpa intervensi politik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya pencegahan kejahatan berat yang dapat mengakibatkan hukuman mati.

Keputusan mengenai kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang baru akan lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

**Il. Wicakana**  
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

**Il. Wicakana**  
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

**Il. Wicakana**  
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

[Selengkapnya...](#)